

KEHORMATAN NEGARA MELALUI INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK

Jum'at, 28 Agustus 2026 - Nurul Istiamuji

"Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur sulit diperbaiki."

- Mohammad Hatta

Saya tertarik dengan sebuah karya biografis berjudul "Hatta: Aku Datang Karena Sejarah". Tulisan tersebut mengingatkan kita pada satu esensi mendalam: kehadiran seseorang di gelanggang pengabdian negara bukanlah sebuah kebetulan, melainkan panggilan sejarah.

Meminjam spirit dan pemikiran Bung Hatta yang selalu merujuk pada dedikasi tanpa pamrih, kita dipanggil untuk menyadari bahwa negara, perjuangan, dan pelayanan publik adalah satu kesatuan napas yang tidak terpisahkan.

Negara Sebagai Wadah Pemenuhan Hak

Negara didirikan bukan sekadar sebagai monumen euforia kemerdekaan, melainkan memikul kewajiban suci untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam memenuhi hak serta kebutuhan dasarnya. Negara hadir secara konstitusional untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, struktur birokrasi tidak boleh dirancang sebagai mesin kekuasaan yang mengintimidasi, melainkan harus hadir sebagai pelayan yang memanusiakan warganya.

Transformasi Perjuangan: Dari Senjata Menuju Keadilan Layanan

Di masa revolusi, perjuangan identik dengan mengorbankan nyawa di medan tempur. Di masa kini, makna perjuangan telah bertransformasi. Al-Qur'an secara tegas memperingatkan agar kita tidak mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada kita.

Mengkhianati amanat publik-seperti melakukan penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, atau bersikap diskriminatif-adalah bentuk penjajahan gaya baru terhadap masyarakat sendiri.

Perjuangan hakiki seorang penyelenggara negara hari ini adalah menjaga integritas. Amanat Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia menekankan pentingnya menumbuhkembangkan iklim pengawasan untuk mendorong penyelenggaraan negara yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hanya dengan keberanian membasmis maladministrasilah setiap warga negara dapat memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang hakiki.

Komitmen Moral Pelayan Negara

Bung Hatta mengajarkan bahwa kesederhanaan dan keteguhan prinsip adalah senjata utama seorang abdi negara. Komitmen ini selaras dengan Undang-Undang Pelayanan Publik yang mewajibkan setiap pelaksana untuk selalu cermat, santun, ramah, adil, profesional, dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut.

Nilai-nilai ini juga diperkuat oleh landasan ilahiah: umat manusia diperintahkan untuk menjadi penegak keadilan meskipun berisiko menentang diri sendiri, orang tua, maupun kerabat. Seseorang yang telah mengambil sumpah jabatan

dilarang keras meningkari sumpah tersebut atau menggunakannya sebagai alat penipuan. Setiap pelayan negara tidak sepatasnya berjalan di muka bumi dengan kesombongan seolah-olah berkuasa penuh, melainkan harus tunduk pada asas kepatutan, keadilan, nondiskriminasi, dan akuntabilitas.

?Pengabdian Sebagai Jalan Spiritual

Pada akhirnya, komitmen untuk menjadi pelayan negara yang jujur adalah bentuk ibadah dan nilai pengabdian yang sangat luhur. Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan kewenangan semata-mata demi mencari keridaan Tuhan dan menolong sesama akan dilipatgandakan ganjaran kebbaikannya.

?Bung Hatta datang karena sejarah, dan kini kitalah yang sedang menuliskan sejarah itu. Menjadi pelayan negara bukan tentang meraup kebanggaan status atau memperkaya diri, melainkan memegang teguh amanat agung untuk merawat kehormatan republik.

?Ketika setiap penyelenggara negara teguh memberikan pelayanan secara adil, sigap mengurus pengaduan masyarakat, dan tidak menyalahgunakan jabatan, pada detik itulah cita-cita kemerdekaan benar-benar terwujud di bumi pertiwi Republik Indonesia yang kita cintai ini.